



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp11.159.687.903.416,00 (sebelas triliun seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Yvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Batang Gadis 1 X 0.9 MW yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Utara dan Aceh)	1994/1995	Rp4.258.402.000,00
2	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan Blok II 1 X 430 MW di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Utara dan Aceh)	1994/1995	Rp859.221.217.230,00
3	PLTM Sepakat 2 X 875 kW di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Utara dan Aceh)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp13.251.463.000,00
4	PLTD Gunung Sitoli 3 X 1500 kW dan PLTM Arul Relem 1 X 350 kW di Provinsi Sumatera Utara hasil	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997,	Rp11.344.005.000,00

kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Utara dan Aceh)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	
5	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansipahoras Power Station (PS) Nomor 1 33 MW Dan PS Nomor 2 17 MW di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Utara dan Aceh)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	Rp770.477.657.075,00
6	PLTA Renun 2 x 41 MW di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Utara dan Aceh)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	Rp1.584.010.897.719,00
7	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bukit Asam 4 x 65 MW yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp173.234.031.854,00
8	Relokasi Jalan Nasional Kota Panjang yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002	Rp108.624.749.307,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
9	PLTD Sei Baloi Batam 2 x 12 MW yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp51.843.562.683,00
10	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Padang 2 x 30 MW yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp39.980.824.110,00
11	PLTD Pilang dan sarana PLTD Payo Selincah 2 x 2,5 MW yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998	Rp14.331.157.329,00
12	PLTA Kotapanjang 3 x 38 MW yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp494.257.201.778,00
13	PLTG Payo Selincah 2 x 30 MW Eks. PLTG Padang yang berlokasi di Provinsi Jambi hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp6.233.344.608,00

14 PLTA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
14	PLTA Besai 2 x 45 MW yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002	Rp55.888.845.947,00
15	PLTA Batutegi 2 x 14 MW beserta sarana & <i>Power Line Carrier</i> (PLC) yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002	Rp95.796.237.067,00
16	PLTU Ombilin 2 x 100 MW yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp893.488.983.180,00
17	PLTA Singkarak 4 x 43,75 MW yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp215.267.240.438,00
18	PLTD Merawang 3 x 5 MW yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp3.785.628.678,00

19 PLTD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
19	PLTD Tanjung Pinang 2 x 5 MW dan PLTD Tanjung Balai Karimun 2 x 3 MW yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003	Rp6.912.060.979,00
20	PLTA Musi 3 X 70 MW beserta sarananya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	Rp244.200.379.697,00
21	PLTGU Muara Karang Tahap 1 & 2, 500 MW yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1995/1996	Rp456.419.009.550,00
22	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak 2 x 55 MW yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1995/1996	Rp6.952.059.259,00
23	PLTGU Tanjung Priok 1.180 MW yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan	1995/1996	Rp92.289.941.545,00

Jawa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)		
24	PLTP Darajat Unit I (1 x 55 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1995/1996	Rp11.330.718.795,00
25	Renovasi PLTA Ketenger dan transmisinya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1995/1996	Rp150.002.684,00
26	Renovasi PLTA Jelok yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1995/1996	Rp1.258.268.965,00
27	Renovasi PLTA Giringan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1995/1996	Rp16.681.846,00
28	Modifikasi Pembakaran PLTGU Gresik Unit 3 dan 4 yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995	Rp47.547.374.095,00
29	PLTU Paiton Unit 1 dan 2 (2 x 400 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Satuan	1996/1997	Rp324.570.960.399,00

kerja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)		
30	PLTD Tanjung Karang Phase 1 dan 2 (4 x 7,6 MW) yang berlokasi di Ampenan Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995	Rp58.397.696.538,00
31	PLTP Gunung Salak Unit 1 dan 2 (2 x 55 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995, 1995/1996	Rp20.005.205.136,00
32	PLTP Darajat Unit I (1 x 55 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997	Rp190.017.585.489,00
33	Renovasi PLTA Kracak, Ubrug Plengan dan Lamajan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995, 1995/1996	Rp2.385.167.797,00
34	2 Unit PLTM Sampean Baru - Bondowoso (2 x 1,953 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp9.679.740.545,00

35 PLTA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
35	PLTA Cirata II Unit 5, 6, 7 dan 8 (4 x 125 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998	Rp309.128.470.489,00
36	PLTU Suralaya Unit 5, 6 dan 7 (3 x 600 MW) yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp2.378.087.519.742,00
37	PLTD Ni'u Bima (2 x 2,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1997/1998, 1998/1999, 2000	Rp7.496.983.129,00
38	PLTD Labuhan Sumbawa Besar Unit 1 dan 2 (2 x 3 MW) yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1997/1998, 1999/2000, 2000	Rp2.145.144.102,00
39	PLTA Wonorejo (1x 6,5 MW) dan prasarana yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1996/1997, 1998/1999, 2000, 2001, 2002	Rp32.868.340.466,00
40	PLTA Tulis (2 x 6,2 MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah	2000, 2001, 2002, 2003	Rp331.004.362,00

hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja Inkitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)		
41	PLTD Palangkaraya (1 x 2,799 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996	Rp1.404.193.059,00
42	PLTD Pangkalan Bun Unit I (1 x 2,799 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996	Rp1.188.773.216,00
43	PLTD Amuntai (2 x 2,5 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997	Rp17.143.152.135,00
44	PLTD Pangkalan Bun Unit II (1 x 2,799 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996	Rp1.406.519.440,00
45	PLTM Baras (1 x 200 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997	Rp2.841.630.037,00

46 PLTG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
46	PLTG Pontianak (1 x 34 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp10.334.500.000,00
47	PLTGU Samarinda (3 x 20 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp53.970.920.541,00
48	PLTG Apung I Banjarmasin (1 x 30/40 MW) yang berlokasi di Seberang Barito Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp1.046.395.550,00
49	PLTD Singkawang (3 x 2,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp5.107.833.300,00
50	PLTD Sambas (2 x 1,5 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp3.081.522.257,00
51	PLTD Sintang (3 x 1,5 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan	1996/1997, 1997/1998,	Rp4.442.440.200,00

Barat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1998/1999, 1999/2000	
52	PLTD Tarakan (2 x 2,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp4.118.049.276,00
53	PLTD Sampit (2 x 2,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp3.462.945.541,00
54	PLTU Banjarmasin (Asam-asam) Unit 1 dan 2 (2 x 65 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja Inkitring Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001	Rp469.377.594.592,00
55	PLTD (2 x 2,5 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1994/1995	Rp26.427.540.058,00
56	PLTM Poigar (2 x 1,2 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1994/1995, 1995/1996	Rp5.184.718.752,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
57	PLTG Ujung Pandang (2 x 30-40 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp60.207.159.377,00
58	PLTM Winning (2 x 0,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp4.456.729.662,00
59	PLTA Tanggari II (2 x 9,5 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999	Rp29.139.141.302,00
60	PLTM Kolondom (2 x 0,77 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp15.567.953.702,00
61	PLTD Gorontalo Unit 8 dan 9 (2 x 2,5 MW) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp10.393.209.536,00
62	PLTD Marisa (2 x 1,2 MW) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp18.413.807.215,00

63 PLTM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
63	PLTM Bambalo (2 x 4 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp13.071.945.471,00
64	PLTD Kendari (2 x 2,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp31.369.810.964,00
65	PLTP Lahendong (1 x 20 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001	Rp191.159.709.479,00
66	PLTD Palu (1 x 11 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp35.229.641.003,00
67	PLTD Gorontalo Unit 6 dan 7 (2 x 2,8 MW) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp36.099.232.461,00
68	PLTD Bitung (1 x 11 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000	Rp30.360.666.538,00
69	PLTD Ternate (2 x 3 MW) yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara	1998/1999, 1999/2000,	Rp51.775.094.510,00

hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	2000, 2001	
70	PLTM Ulung Peliang (1 x 1,09 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002	Rp12.619.819.486,00
71	PLTA Bili-Bili Unit 1 (1 x 6 MW), Unit II (1 x 14 MW) dan Jaringan Distribusi 20 kV Bili-Bili-Boronloe yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks. Satuan Kerja Inkitring Sulawesi)	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006	Rp200.724.701.804,00
72	PLTD yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Bangka Belitung	2005	Rp5.246.602.000,00
73	PLTD (6 x 400) yang berlokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1996/1997	Rp4.593.224.000,00
74	PLTD (3 x 2 MW) yang berlokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997	Rp15.867.666.535,00
75	PLTD (4 x 375 kW) yang berlokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1995/1996	Rp2.987.778.216,00
76	PLTD Desa (5 x 40 kW) dan Jaringan Distribusi 20 kV yang berlokasi di Provinsi Kalimantan	1994/1995	Rp5.230.492.709,00

Barat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat		
77	PLTD Desa Tahap II yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1994/1995	Rp1.430.832.001,00
78	PLTD Desa dan Jaringan Distribusi 20 kV yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1995/1996	Rp14.654.985.608,00
79	PLTD Desa dan Jaringan Distribusi 20 kV yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1996/1997	Rp28.721.836.381,00
80	PLTD (9 x 130 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1996/1997	Rp2.150.600.931,00
81	Mesin <i>Genset Mobile</i> dan Sambungan Rumah (SR) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1996/1997	Rp2.126.208.246,00
82	PLTD (11 x 475 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1997/1998	Rp9.932.935.890,00
83	PLTD Desa dan Jaringan Distribusi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1997/1998	Rp21.751.564.071,00
84	PLTD (3 x 1,2 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1998/1999	Rp8.796.359.000,00

85 PLTD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
85	PLTD (5 x 740 kW) tersebar yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1998/1999	Rp4.857.651.511,00
86	Satuan Pembangkit <i>Diesel Mobile</i> (1 x 250 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1999/2000	Rp815.082.000,00
87	PLTD <i>Phase II-IP 465</i> (8 x 1.400 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1999/2000	Rp4.948.630.284,00
88	PLTD dan prasarana (1 x 1.000 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	1999/2000	Rp8.973.888.470,00
89	PLTD dan prasarana (2 x 500 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	2000	Rp2.132.828.464,00
90	PLTD dan prasarana (7 x 3.386 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	2001	Rp12.118.777.000,00
91	PLTD serta prasarana (4 x 1.950 kW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	2002	Rp7.232.241.000,00
92	PLTD tersebar Tahap I (3 x 1.500 kW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan	1999/2000	Rp3.403.127.151,00

satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan		
93	PLTD Desa (1 x 100 kW) yang berlokasi di Provinsi Maluku hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku	1994/1995	Rp151.533.872,00
94	PLTD <i>Mobile</i> /Mercedes (4 x 500 kVA) yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp7.653.800.000,00
95	PLTD <i>Mobile</i> /Deutz (2 x 1.200 kVA) yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp9.682.400.000,00
96	PLTD <i>Mobile</i> /Mercedes (2 x 500 kVA) yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp3.961.650.000,00
97	PLTD <i>Mobile</i> /Mercedes (2 x 500 kVA) yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp3.961.650.000,00
98	<i>Carrier Vehicle</i> PLTD <i>Mobile</i> Isuzu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp269.500.000,00
99	PLTD <i>Mobile</i> /Deutz (4 x 500 kVA)	2001	Rp7.821.000.000,00

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)		
100	<i>Carrier Vehicle</i> PLTD <i>Mobile</i> Isuzu yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp269.500.000,00
101	PLTD <i>Mobile</i> /Deutz (1 x 500 kVA) yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp1.532.125.000,00
102	PLTD <i>Mobile</i> /Deutz (2 x 250 kVA) yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp3.201.943.000,00
103	PLTD <i>Mobile</i> /Deutz (3 x 300 kVA) yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Ditjen Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)	2001	Rp4.596.375.000,00
JUMLAH			Rp11.159.687.903.416,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Widiana Djaman